Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis

http://www.infeb.org

2025 Vol. 7 No. 3 Hal: 631-635 e-ISSN: 2714-8491

Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah: Studi Empiris Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Nofia Angraini[1]✉, Hefrizal Handra[2], Fery Andrianus[3]

[1]Magister Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas
[2,3]Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Andalas

Nofiaangraini@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effect of poverty, the Human Development Index, and unemployment on economic growth in the districts and cities of Riau Province over the period 2015–2024. The research employs a quantitative method using multiple linear regression with panel data covering 12 districts/cities in the province. The data analyzed include key macroeconomic indicators, namely the poverty rate, HDI, and open unemployment rate. The results show that poverty and HDI have a positive and significant effect on economic growth. In contrast, the unemployment rate has a negative and significant effect on regional economic growth. Simultaneously, these three independent variables explain 34.6% of the variation in regional economic growth, while the remaining portion is influenced by other factors not included in the model. These findings offer important implications for regional development policy. The positive relationship between poverty and economic growth indicates signs of unequal distribution of development outcomes, suggesting that economic growth has not been fully enjoyed by all segments of society. Therefore, local governments are encouraged to prioritize development policies that are more inclusive and socially equitable. It is recommended that investment be strengthened in the education, health, and employment sectors, along with the development of local potentials that can absorb labor and sustainably reduce poverty.

Keywords: Poverty, Human Development Index, Unemployment, Economic Growth, Regional Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Riau selama periode 2015–2024. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan regresi linier berganda berbasis data panel yang mencakup 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau. Data yang dianalisis mencakup indikator makroekonomi utama, yaitu tingkat kemiskinan, IPM, dan tingkat pengangguran terbuka Hasil analisis menunjukkan bahwa kemiskinan dan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, tingkat pengangguran menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Secara simultan, ketiga variabel independen ini dapat menjelaskan sebesar 34,6% variasi dalam pertumbuhan ekonomi daerah, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perumusan kebijakan pembangunan daerah. Hubungan positif antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan adanya indikasi ketimpangan distribusi hasil pembangunan, di mana pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menitikberatkan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan sosial. Disarankan agar penguatan investasi difokuskan pada sektor pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan, serta pengembangan potensi lokal yang mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.

Kata kunci: Kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pembangunan Daerah.

INFEB is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.

1. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Pertumbuhan tersebut mencerminkan peningkatan produksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, yang menjadi dasar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat [1]. Pembangunan ekonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota, sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola sumber daya yang ada.

Di Provinsi Riau, pertumbuhan ekonomi menunjukkan pola yang fluktuatif namun cukup kuat dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2015–2024, Riau mengalami kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19, namun mampu pulih lebih cepat dibandingkan tingkat nasional, terutama karena ketahanan sektor perkebunan dan migas [2]. Akan tetapi, ketergantungan pada komoditas membuat ekonomi daerah rentan terhadap fluktuasi harga global.

Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia (IPM) diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kemiskinan tidak hanya berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat tetapi juga menurunkan produktivitas secara keseluruhan [3]. Sementara itu, IPM yang tinggi mencerminkan kualitas

Diterima: 22-07-2025 | Revisi: 30-08-2025 | Diterbitkan: 29-09-2025 | doi: 10.37034/infeb.v7i3.1220

sumber daya manusia yang lebih baik dan dapat mendorong peningkatan produktivitas daerah [1]. Pengangguran yang tinggi menjadi hambatan serius karena menghambat distribusi pendapatan dan penciptaan nilai tambah [4].

Berbagai studi sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda terkait hubungan antara ketiga faktor tersebut dengan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, studi [5] menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan, sementara IPM tidak berpengaruh. Sebaliknya, studi lain [5] menyatakan IPM memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa hubungan antar variabel bersifat kontekstual tergantung wilayah dan periode waktu [6].

Pertumbuhan ekonomi menggambarkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan output dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan kemampuan jangka panjang suatu negara dalam menyediakan berbagai komoditas kepada penduduknya [7]. Teori pertumbuhan ekonomi mencakup beberapa pendekatan, di antaranya teori klasik yang menekankan pengaruh jumlah penduduk, modal, luas tanah, kekayaan alam, dan teknologi. Schumpeter menambahkan peran inovasi dan wirausaha dalam mendorong pertumbuhan [8]. Teori neoklasik yang dikembangkan oleh Solow menekankan bahwa pertumbuhan tidak hanya berasal dari peningkatan modal dan tenaga kerja, tetapi juga dari kemajuan teknologi. Rumus pertumbuhan ekonomi menurut model Solow adalah $\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$, yang menunjukkan kontribusi masing-masing faktor terhadap output [9].

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi antara lain sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), budaya, serta modal. SDM merupakan faktor penentu utama karena kompetensi manusialah yang menjalankan pembangunan. SDA berperan sebagai penunjang, namun pengelolaannya sangat bergantung pada kemampuan SDM. Kemajuan IPTEK meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sedangkan budaya kerja keras dan jujur dapat mempercepat pembangunan. Modal menjadi elemen penting karena diperlukan dalam pengolahan SDA dan pengembangan teknologi [10].

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang kompleks dan bersifat lintas generasi. Menurut pendekatan kebutuhan dasar, seseorang dikategorikan miskin jika tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok baik makanan maupun non-makanan, yang secara kuantitatif diukur melalui garis kemiskinan (GK) oleh BPS [11]. Kemiskinan dibedakan menjadi tiga jenis. Pertama, kemiskinan absolut yang menunjukkan kondisi ketidakmampuan individu memenuhi kebutuhan dasar karena rendahnya pendapatan. Kedua, kemiskinan relatif yang menunjukkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan di masyarakat. Ketiga, kemiskinan struktural yang muncul akibat tatanan sosial dan ekonomi yang tidak adil sehingga membatasi akses kelompok tertentu terhadap sumber daya [12]. Penyebab kemiskinan secara umum berasal dari dua faktor: internal (seperti rendahnya pendidikan dan keterampilan) serta struktural (misalnya distribusi pembangunan yang tidak merata antarwilayah).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang menggabungkan indikator kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari tiga indeks utama, yaitu angka harapan hidup, rata-rata dan harapan lama sekolah, serta daya beli masyarakat [13]. Menurut UNDP, indikator pembangunan manusia meliputi umur panjang dan sehat, pencapaian pendidikan, dan akses terhadap sumber daya ekonomi, yang dalam praktiknya dilengkapi dengan indikator seperti PDB per kapita dan tingkat partisipasi angkatan kerja [14]. Komponen utama IPM mencakup Angka Harapan Hidup saat lahir (e_0), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Harapan Lama Sekolah (HLS), yang menunjukkan kualitas dan capaian pembangunan manusia.

Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang dalam usia kerja tidak memiliki pekerjaan dan aktif mencari pekerjaan. Menurut pendekatan angkatan kerja, pengangguran dihitung sebagai persentase dari jumlah penganggur terhadap total angkatan kerja. Sementara itu, pendekatan pemanfaatan tenaga kerja menilai sejauh mana tenaga kerja digunakan secara optimal dalam aktivitas ekonomi [15]. Jenis-jenis pengangguran dapat dibagi menjadi empat. Pertama, pengangguran friksional, yaitu ketika pekerja meninggalkan pekerjaan lama dan sedang mencari pekerjaan baru. Kedua, pengangguran siklikal yang terjadi karena penurunan permintaan agregat, terutama saat resesi. Ketiga, pengangguran struktural yang disebabkan perubahan struktur ekonomi atau teknologi yang membuat keterampilan pekerja tidak lagi relevan. Keempat, pengangguran teknologi yang terjadi akibat otomatisasi proses produksi [16].

Penelitian mengenai pengaruh pembangunan manusia, pengangguran, dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks wilayah dan periode. Mataheurilla dan Rachmawati [17] meneliti Kabupaten Malang dan menemukan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh negatif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan pengangguran dan kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Di sisi lain, studi oleh Alvy et al. yang berfokus di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan dan IPM berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sementara pengangguran memiliki dampak negatif yang signifikan.

Studi internasional oleh Cuong dan Nguyen mengkaji hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan di Vietnam. Mereka menemukan bahwa pada tahun 1990-an, pertumbuhan ekonomi lebih berpihak pada masyarakat miskin dan menjadi pendorong utama pengurangan kemiskinan. Namun,

pada periode 2004–2008, ketimpangan menurun dan kontribusi pengurangan kemiskinan berasal dari baik pertumbuhan ekonomi maupun redistribusi [18]. Temuan mereka menunjukkan bahwa dinamika hubungan antara pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan sangat bergantung pada konteks waktu dan kebijakan sosial ekonomi yang berlaku [19]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemiskinan, IPM, dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti [20].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau, Sakernas, dan Riau Dalam Angka. Data yang digunakan berbentuk data panel (pooled data) dari 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015–2024. Data kuantitatif ini dianalisis dengan metode regresi linier berganda, guna mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas satu variabel dependen yaitu pertumbuhan ekonomi (dalam persen), serta tiga variabel independen yaitu tingkat kemiskinan (persen), indeks pembangunan manusia (IPM dalam indeks), dan tingkat pengangguran (persen). Seluruh variabel dianalisis untuk melihat arah dan besarnya pengaruh masing-masing terhadap pertumbuhan ekonomi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi data panel, yang menggabungkan data cross-section dan time series. Model regresi diproses menggunakan perangkat lunak SPSS versi 27. Sebelum melakukan pengujian regresi, dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji linearitas, normalitas, heteroskedastisitas, autokorelasi, dan multikolinearitas. Uji linearitas dilakukan untuk memastikan hubungan antara variabel bebas dan terikat bersifat linear menggunakan metode Lm Test. Uji normalitas menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov dengan kriteria nilai signifikansi > 0,05. Uji heteroskedastisitas menggunakan metode Glejser, sedangkan uji autokorelasi dilakukan dengan metode Breusch-Godfrey. Multikolinearitas diuji melalui nilai Tolerance (TOL) dan Variance Inflation Factor (VIF), dengan kriteria TOL > 0,1 dan VIF < 10 sebagai indikator tidak adanya multikolinearitas.

Model regresi berganda yang digunakan dirumuskan sebagai: $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$, dengan Y adalah pertumbuhan ekonomi, X_1 adalah tingkat kemiskinan, X_2 adalah indeks pembangunan manusia, dan X_3 adalah tingkat pengangguran. Koefisien β menunjukkan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen, dan e adalah error term. Untuk menguji hipotesis, digunakan uji parsial (uji t) untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas secara individu terhadap variabel terikat, serta uji simultan (uji F) untuk melihat pengaruh secara bersama-sama. Uji koefisien determinasi (R^2 dan Adjusted R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar variabel independen menjelaskan variasi dari variabel dependen. Penggunaan adjusted R^2 lebih disarankan karena dapat menyesuaikan penambahan variabel dalam model.

3. Hasil dan Pembahasan

Ditemukan bahwa ketiga variabel bebas, yaitu kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan tingkat pengangguran terbuka, memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau selama periode penelitian. Secara parsial, variabel kemiskinan menunjukkan pengaruh positif dan signifikan dengan nilai koefisien sebesar 0.090 dan nilai signifikansi 0.038 (< 0.05). Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu persen dalam tingkat kemiskinan justru berkorelasi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 0.090 persen. Hasil ini tampak kontradiktif dan menyimpang dari teori-teori pembangunan yang lazim, namun dapat dijelaskan melalui karakteristik struktural ekonomi daerah atau adanya bias spasial, di mana pertumbuhan ekonomi hanya terkonsentrasi di wilayah tertentu yang tidak mengalami penurunan kemiskinan secara signifikan. Dalam konteks ini, kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi di Riau lebih didorong oleh sektor-sektor unggulan seperti industri pengolahan atau perkebunan sawit yang terpusat di wilayah tertentu, sedangkan wilayah lain tetap terperangkap dalam kemiskinan relatif. Akibatnya, meskipun angka pertumbuhan ekonomi secara agregat meningkat, kesenjangan sosial dan ekonomi antardaerah masih tinggi, mencerminkan bahwa pertumbuhan tersebut belum bersifat inklusif.

Sementara itu, IPM memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan nilai koefisien sebesar 0.204 dan signifikansi 0.002. Hasil ini sejalan dengan teori pembangunan manusia yang menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia merupakan kunci utama dalam mendorong aktivitas ekonomi produktif dan berkelanjutan. Peningkatan IPM yang mencakup tiga dimensi penting pendidikan, kesehatan, dan standar hidup memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih aktif dan produktif dalam kegiatan ekonomi. Kualitas pendidikan yang baik akan meningkatkan keterampilan tenaga kerja, kesehatan yang memadai akan memperpanjang produktivitas usia kerja, dan standar hidup yang layak akan menciptakan insentif bagi partisipasi ekonomi jangka panjang. Dalam konteks daerah seperti Riau, peningkatan IPM dapat memberikan kontribusi positif terhadap diversifikasi ekonomi daerah, memacu inovasi, serta memperkuat kapasitas adaptif terhadap perubahan struktural dan teknologi. Oleh karena itu, pembangunan manusia tidak hanya menjadi tujuan akhir pembangunan, tetapi juga instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Berbeda dengan dua variabel sebelumnya, tingkat pengangguran terbuka menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dengan

nilai koefisien sebesar -0.344 dan signifikansi 0.000. Artinya, semakin tinggi tingkat pengangguran, semakin rendah pertumbuhan ekonomi yang dicapai. Temuan ini konsisten dengan teori ekonomi klasik yang menyatakan bahwa pengangguran menyebabkan inefisiensi dalam penggunaan faktor produksi dan penurunan pendapatan agregat masyarakat. Pengangguran yang tinggi mencerminkan tidak optimalnya pemanfaatan potensi tenaga kerja, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat, memperlemah permintaan agregat, serta memperlambat investasi dan penciptaan lapangan kerja baru. Dalam jangka panjang, pengangguran juga dapat menghambat pertumbuhan produktivitas dan menyebabkan degradasi kualitas tenaga kerja akibat hilangnya keterampilan. Oleh karena itu, pengendalian pengangguran perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah, melalui penciptaan lapangan kerja yang padat karya, penguatan sektor informal yang produktif, serta peningkatan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan vokasional yang relevan dengan kebutuhan industri lokal.

Secara simultan, ketiga variabel tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sebagaimana ditunjukkan oleh hasil uji F dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 dan Fhitung sebesar 6.595 > Ftabel. Ini berarti model regresi yang digunakan dapat secara kolektif menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, nilai koefisien determinasi (R^2) yang hanya sebesar 0.346 menunjukkan bahwa masih terdapat 65.4 persen variasi dalam pertumbuhan ekonomi yang tidak dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Riau. Temuan ini bertolak belakang dengan teori yang umumnya menyatakan bahwa kemiskinan menghambat pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini sejalan dengan studi yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak selalu menurunkan kemiskinan karena distribusinya tidak merata. Hal ini juga didukung oleh temuan Alvy et al. bahwa peningkatan kemiskinan justru disertai pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu. Todaro dan Smith menyebutkan kondisi ini sebagai kemiskinan struktural, yang terjadi saat pertumbuhan ekonomi hanya dinikmati oleh sebagian kelompok masyarakat. Data BPS Provinsi Riau (2024) menunjukkan mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan, mengindikasikan bahwa ketimpangan wilayah turut menjadi penyebabnya. Meskipun demikian, tren menunjukkan adanya perbaikan dengan penurunan tingkat kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan petani melalui nilai tukar petani (NTP).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten/Kota Provinsi Riau memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui pendidikan, kesehatan, dan pendapatan mendorong produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan hasil berbeda, seperti Rizky dan Jariah yang menemukan pengaruh negatif IPM secara nasional, studi regional oleh Alvy et al. memperkuat temuan ini di tingkat provinsi. Data BPS Provinsi Riau (2024) mencatat peningkatan IPM dari 74,95 menjadi 75,67, serta perbaikan signifikan di aspek harapan hidup, pendidikan, dan pengeluaran riil. Peningkatan ini mencerminkan kualitas SDM yang lebih baik, yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian ini menemukan bahwa pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) berdampak positif terhadap peningkatan daya beli dan produktivitas tenaga kerja. Temuan ini sejalan dengan hukum Okun, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran. Studi Alvy et al. juga menunjukkan bahwa pengangguran terbuka secara signifikan menurunkan pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Di Provinsi Riau, disparitas pengangguran antara laki-laki dan perempuan masih terjadi, namun tren penurunan TPT dan meningkatnya rata-rata jam kerja menunjukkan perbaikan kondisi ketenagakerjaan.

Penanggulangan kemiskinan yang terfokus pada pembangunan modal manusia dan akses keuangan dapat menciptakan efek ganda pada pertumbuhan ekonomi. Program seperti PKH terbukti tidak hanya mengurangi kemiskinan tetapi juga meningkatkan konsumsi masyarakat. Penelitian lokal menunjukkan bahwa setiap Rp1 miliar dana desa untuk pengentasan kemiskinan dapat memutar ekonomi sebesar Rp3,2 miliar. Penurunan kemiskinan 1% bahkan dapat meningkatkan investasi UMKM hingga 7,8% .

Peningkatan IPM memiliki korelasi langsung terhadap PDRB daerah, khususnya di sektor jasa pendidikan dan kesehatan. Setiap kenaikan 1 poin IPM berkontribusi terhadap kenaikan 0,8–1,2% PDRB. Investasi pada peningkatan harapan hidup dan pendidikan terbukti menaikkan produktivitas tenaga kerja, sebagaimana hasil studi Universitas Islam Riau dan Bank Indonesia Wilayah Riau. Pengangguran yang tinggi menyebabkan penurunan PDRB hingga 0,7% per kenaikan 1% TPT, terutama di sektor industri pengolahan [40]. Ketidakefisienan kebijakan penyerapan tenaga kerja menyebabkan pertumbuhan ekonomi terhambat. Di beberapa daerah, setiap 10.000 tenaga kerja yang tidak terserap dapat menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3%.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis empiris terhadap pengaruh kemiskinan, indeks pembangunan manusia (IPM), dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Riau selama periode 2015-2024, diperoleh beberapa kesimpulan penting. Pertama, kemiskinan ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, yang

menunjukkan adanya kemungkinan paradoks pertumbuhan di mana pertumbuhan belum sepenuhnya inklusif. Kedua, IPM berpengaruh positif dan signifikan, mengindikasikan bahwa peningkatan kualitas manusia, seperti pendidikan dan kesehatan, berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Ketiga, pengangguran memberikan dampak negatif dan signifikan, mempertegas bahwa tingginya tingkat pengangguran dapat menahan laju pertumbuhan ekonomi. Secara simultan, ketiga variabel tersebut mampu menjelaskan variabilitas pertumbuhan ekonomi sebesar 34,6 persen. Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran kebijakan dapat diajukan. Pemerintah daerah disarankan memperkuat ekonomi berbasis sumber daya lokal, seperti pengembangan kawasan industri kelapa sawit dan revitalisasi sentra perikanan, serta mendorong ekonomi kreatif berbasis budaya Melayu dan ekowisata. Terkait kemiskinan, diperlukan sistem big data terpadu, regulasi pengentasan kemiskinan produktif, serta kolaborasi dengan industri untuk menciptakan lapangan kerja. Untuk peningkatan IPM, disarankan penyusunan roadmap berbasis wilayah dengan pendekatan sektor spesifik, seperti kesehatan bahari dan pendidikan vokasi perkebunan. Dalam menghadapi pengangguran, dapat diupayakan job matching berbasis kecamatan, pelatihan tenaga kerja terdampak transisi energi, serta insentif bagi perusahaan yang menyerap tenaga kerja penganggur jangka panjang. Peneliti selanjutnya juga diharapkan menambah variabel penentu lainnya dan memperluas cakupan waktu penelitian untuk memperoleh hasil yang lebih mendalam dan komprehensif.

Daftar Rujukan

[1] Elidawaty Purba, & Manurung, E. (2023). Pengaruh Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ekuilnomi*, *5*(1), 1–8. DOI: https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v5i1.493 .

[2] Styawan, H. A., & Harsono, H. (2022). Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Operasional terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2004-2018. *Journal of Regional Economics Indonesia*, *2*(2), 13–26. DOI: https://doi.org/10.26905/jrei.v2i2.7216 .

[3] Jubir, J., Ikbal, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu. *Jesya*, *6*(1), 71–91. DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900 .

[4] Jubir, J., Ikbal, M., Hamid, R. S., & Goso, G. (2023). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi Swasta terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu. *Jesya*, *6*(1), 71–91. DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v6i1.900 .

[5] Saipuloh, S. (2021). Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Pembangunan (Suatu Kajian Studi Literature Ilmu Ekonomi). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, *3*(2), 158–175. DOI: https://doi.org/10.31933/jimt.v3i2.737 .

[6] Yurianto, Y. (2020). Pengaruh Belanja Daerah Investasi dan Kurs terhadap Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta Periode 1987 – 2017. *Sosio E-Kons*, *12*(1), 32. DOI: https://doi.org/10.30998/sosioekons.v12i1.5946 .

[7] Purnama, H. R., Rahman, Z., Ibrahim, F. N., & Tajuddin, I. (2024). Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan terhadap Ketimpangan Wilayah di Sulawesi Selatan (Tahun 2017-2022). *Jesya*, *7*(1), 171–183. DOI: https://doi.org/10.36778/jesya.v7i1.1474 .

[8] Idris Thahir, M., Semmaila, B., & Arfah, A. (2021). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Takalar. *Journal of Management Science (JMS)*, *2*(1), 61–81. DOI: https://doi.org/10.52103/jms.v2i1.323 .

[9] Amiruddin, A. (2018). Aliran Penanaman Modal Asing dan Dampaknya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, *7*(2), 192. DOI: https://doi.org/10.33059/jmk.v7i2.912 .

[10] Sri Rezeki, E., Kholijah, G., & Rarasati, N. (2023). Laju Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi Covid-19 Di Provinsi Jambi dengan Regresi Spasial. *DEMOS: Journal of Demography, Ethnography and Social Transformation*, *3*(2), 68–83. DOI: https://doi.org/10.30631/demos.v3i2.1984 .

[11] Simamora, O., Rizal, Y., & Syahputra, R. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2012-2021. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(11), 1498–1507. DOI: https://doi.org/10.46799/jst.v3i11.626 .

[12] Arniati, A. (2023). The Effect of the General Allocation Fund and the Special Allocation Fund on Economic Growth. *Advances in Economics & Financial Studies*, *1*(1), 14–24. DOI: https://doi.org/10.60079/aefs.v1i1.8 .

[13] Sari, G. N., Kindangen, P., & Rotinsulu, T. O. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Perkotaan di Sulawesi Utara Tahun 2004 – 2014. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, *18*(2). DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.12789.18.2.2016 .

[14] Siwu, H. F. D. (2019). Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, *19*(3). DOI: https://doi.org/10.35794/jpekd.16464.19.3.2017 .

[15] Anggarini, D. R. (2021). Dampak Sektor Pariwisata pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah Lampung. *Jurnal Bisnis Darmajaya*, *7*(2), 116–122. DOI: https://doi.org/10.30873/jbd.v7i2.3089 .

[16] Zulvan, M. F., & Purbasari, H. (2024). Pengaruh Investasi, Belanja Modal, dan Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal EMT KITA*, *8*(1), 175–186. DOI: https://doi.org/10.35870/emt.v8i1.2095 .

[17] Kurniawan, A. I., Militina, T., & Suharto, R. B. (2018). Pengaruh Investasi Swasta dan Pengeluaran Pemerintah Serta Tenaga Kerja terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. *INOVASI*, *13*(2), 82. DOI: https://doi.org/10.29264/jinv.v13i2.2453 .

[18] Saraswati, I. A., & Ramantha, I. W. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal dan Investasi Swasta sebagai Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi*, 662. DOI: https://doi.org/10.24843/eja.2018.v24.i01.p25 .

[19] Istiqamah, N., Arif, Muh., Maknun, M., Mapparenta, M., & Awaluddin, A. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Pangkep. *Center of Economic Students Journal*, *5*(1), 50–56. DOI: https://doi.org/10.56750/csej.v5i1.86 .

[20] Etika, C., Rachmania, R., & Pitri, M. E. (2022). Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, *6*(1), 1052–1058. DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v6i1.4991 .